

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan yang melimpah dan beragam. Keberagaman dari kekayaan alam dan budaya di Indonesia ini merupakan aset berharga yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Kekayaan alam yang ada di Indonesia ini mulai dari hutan hujan tropis, pegunungan, pantai hingga lautan. Sedangkan keberagaman budaya di Indonesia mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga kesenian. Hal ini menjadi salah satu potensi bagi Negara Indonesia sebagai daya tarik dalam sektor industri pariwisata. Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik, mulai dari wisata alam, wisata budaya hingga wisata kuliner.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan pariwisata di Indonesia juga turut berkembang pesat. Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari keindahan alamnya yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara global perkembangan sektor pariwisata menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata ini tidak terlepas dari adanya perkembangan globalisasi. Perkembangan pariwisata dan globalisasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi, karena perkembangan globalisasi telah membuka peluang bagi wisatawan untuk berwisata ke berbagai tempat menarik di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang semakin mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai wisata. (Ramadhani, 2021)

Bersamaan dengan berkembangnya pariwisata dan globalisasi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor

pariwisata. Inovasi dalam pengembangan pariwisata menjadi kunci keberhasilan sektor pariwisata di era globalisasi. Salah satu inovasi tersebut adalah muncullah fenomena tren pariwisata halal (*halal tourism*) yang belakangan ini menjadi sorotan dan banyak menarik perhatian serta pembicaraan baik di kalangan publik. (Muhajir, 2022). Tren pariwisata halal (*halal tourism*) ini merupakan sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan pariwisata. Kesadaran halal saat ini tidak hanya fokus pada produk makanan dan minuman saja, akan tetapi telah berevolusi ke berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor pariwisata.

Seringkali tren pariwisata halal ini disamakan dengan wisata religi yang konsepnya berbau islami, namun pariwisata halal ini didefinisikan sebagai segala sesuatu baik objek atau tindakan pada pariwisata yang diizinkan menurut ajaran Islam (syariah) sebagai dasar dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip Islam. Pelayanan dan fasilitas yang dimaksud adalah tersedianya fasilitas kamar mandi yang membatasi antara laki-laki dengan perempuan, penginapan syariah (hotel atau *homestay*), masjid yang sudah terdapat petunjuk arah kiblat, tersedianya makanan dan minuman yang halal dan pelayanan serta fasilitas lainnya yang mengacu pada norma keislaman. (Nouvanda, 2019).

Keberadaan Islam di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk budaya, kegiatan keagamaan, serta adat istiadat. (Bustamam, 2021). Tren pariwisata halal ini terus digencarkan dan dikembangkan oleh Kemenparekraf. Sebagai salah satu awal untuk merealisasikan tren pariwisata halal di Indonesia, Kemenparekraf menetapkan beberapa provinsi sebagai destinasi wisata halal seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung,

Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. (Dahruji, 2022). Perkembangan pariwisata halal ini semakin menunjukkan peningkatan dengan banyaknya masyarakat muslim yang sudah mulai hijrah ke gaya hidup halal. Hal ini di latar belakang oleh agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia, dilihat dari sisi agama di Indonesia terdiri dari 5 agama dengan persentase 87,5% agama Islam, 7,5% agama Katolik atau Kristen, 2% agama Hindu, 0,9% Buddha, dan 0,8% agama Konghucu. (Risya, 2023).

Melihat hal tersebut terdapat salah satu daerah yang masih termasuk bagian dari provinsi Jawa Timur yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang berpotensi untuk dijadikan sebagai objek pariwisata halal adalah pulau Madura. Madura merupakan pulau yang populer dengan beragam potensi pariwisata yang meliputi wisata alam, wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah serta wisata kuliner. Pulau Madura sendiri memiliki empat kabupaten didalamnya yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. (Holis, 2023). Setiap daerah atau kabupaten yang ada di Madura mempunyai ciri khas kearifan lokalnya masing-masing serta menariknya adalah masyarakatnya sangat mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut membuat Madura sangat berpotensi dijadikan sebagai pariwisata halal, sebab pemahaman akan nilai-nilai agama Islam bagi masyarakatnya tidak perlu diragukan lagi.

Berdasarkan kondisi tersebut setiap pengelola industri pariwisata harus memiliki kekuatan untuk mendukung adanya pengembangan pariwisata halal di Madura. Salah satu peran aktif yang dapat mendukung hal tersebut adalah aset

sumber daya manusia dari pemerintah khususnya pada Dinas Pariwisata di Madura. Pemerintah mempunyai andil terdepan dalam berjalannya sebuah bisnis, walaupun didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber dana yang tercukupi akan tetapi perlu adanya dukungan dari sumber daya manusia yang handal dan paham terhadap konsep *halal tourism* untuk dapat merealisasikan konsep tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintah sebagai pedoman yang harus ikut serta berperan dan berpartisipasi terhadap pengembangan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai keislaman.

Peran dan partisipasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan pariwisata halal di Madura ini. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan antara pemerintah dan pengelola pariwisata dalam menjamin keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis *halal tourism* di Madura. Mengamati hal tersebut fokus peneliti yaitu pada Dinas Pariwisata di Madura yang meliputi empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep terhadap permasalahan penting dalam mengembangkan konsep *halal tourism* pada pariwisata Madura. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam hal tersebut sebagai penelitian ilmiah dengan judul **“Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Eksistensi Pariwisata Di Madura Berbasis *Halal Tourism*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan eksistensi pariwisata di Madura berbasis *halal tourism*?

2. Bagaimana strategi pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata di Madura berbasis *halal tourism*?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan eksistensi pariwisata di Madura berbasis *halal tourism*
2. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata di Madura berbasis *halal tourism*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang dikemukakan oleh peneliti diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai peran dalam pengembangan pariwisata di Madura berbasis *halal tourism*
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan dapat menambah pengetahuan tentang peran dalam pengembangan pariwisata di Madura berbasis *halal tourism*